



BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

*Seamless
Transport
Through
Integration*

BPTJ

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI

**20
24**

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK**

TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

PIt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
SUHARTO

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Monitoring Capaian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan IV Tahun 2024 ini bisa diselesaikan pada waktunya.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020, maka disusunlah Laporan Monitoring Capaian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan IV Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan kinerja, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya *good governance* di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Sasaran Program sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Meskipun disadari bahwa dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dan sebagai umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2025

PIt. KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK

SUHARTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660925 198903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1. LATAR BELAKANG	5
2. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA	7
2.1. Tugas	7
2.2. Fungsi	7
3. STRUKTUR ORGANISASI	8
3.1. Sekretariat	9
3.2. Direktorat Prasarana	9
3.3. Direktorat Lalu Lintas	9
3.4. Direktorat Angkutan	9
4. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
1. Capaian Kinerja	13
1.1. IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	14
1.2. IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	22
1.3. IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	26
1.4. IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	29
1.5. IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	31
2. Alokasi Anggaran Tahun 2024	35
3. Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024	35
4. Efisiensi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024	36
BAB III PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024	11
Tabel II. 1 Realisasi Capaian Kinerja BPTJ Triwulan IV Tahun 2024.....	13
Tabel II. 2 Panjang Trayek Angkot	15
Tabel II. 3 Panjang Trayek Bus	15
Tabel II. 4 Total Panjang Trayek.....	16
Tabel II. 5 Panjang Jalan di Jabodetabek.....	16
Tabel II. 3 Panjang Rel Kereta Api Perkotaan	17
Tabel II. 4 Luas Wilayah Jabodetabek.....	18
Tabel II. 5 Simpul Terintegrasi di Jabodetabek.....	19
Tabel II. 6 Unsur Pelayanan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat	23
Tabel II. 7 Penilaian Unsur Pelayanan.....	24
Tabel II. 8 On Time Performance Bus Perkotaan	27
Tabel II. 9 On Time Performance Kereta Api Perkotaan	27
Tabel II. 10 Kejadian Kecelakaan Tahun 2024	29
Tabel II. 12 Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024	35
Tabel II. 13 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP	35
Tabel II. 14 Efisiensi Anggaran.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	8
Gambar II.1 Kurva S Realisasi Anggaran	35

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terutama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, menjadi dasar utama penyusunan laporan monitoring capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan demi mewujudkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan IV Tahun 2024 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan oleh BPTJ dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Untuk melaporkan

capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis, perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja (*performance result*) tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang telah disesuaikan dengan DIPA TA 2024 berikut revisinya, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan BPTJ. Analisis atas capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyusunan laporan ini melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dengan merinci tujuan-tujuan melalui perumusan indikator kinerja, laporan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana pencapaian tujuan dapat terwujud..

Dalam konteks pelayanan transportasi, wilayah Jabodetabek memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Laporan ini akan menggali bagaimana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merespons kebutuhan masyarakat akan transportasi..

Dalam mencapai sasaran keberlanjutan, laporan ini juga akan menyoroti upaya-upaya yang telah dilakukan. Pentingnya laporan ini tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan internal Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Laporan ini juga memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai upaya yang telah dilakukan oleh badan ini dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan menyusun "Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024," Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memberikan contoh nyata komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan pertanggungjawaban yang ditunjukkan melalui laporan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan landasan untuk perbaikan terus-menerus dalam menghadapi tantangan transportasi yang kompleks di wilayah Jabodetabek

2. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Tugas dan fungsi BPTJ antara lain:

2.1. Tugas

BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

2.2. Fungsi

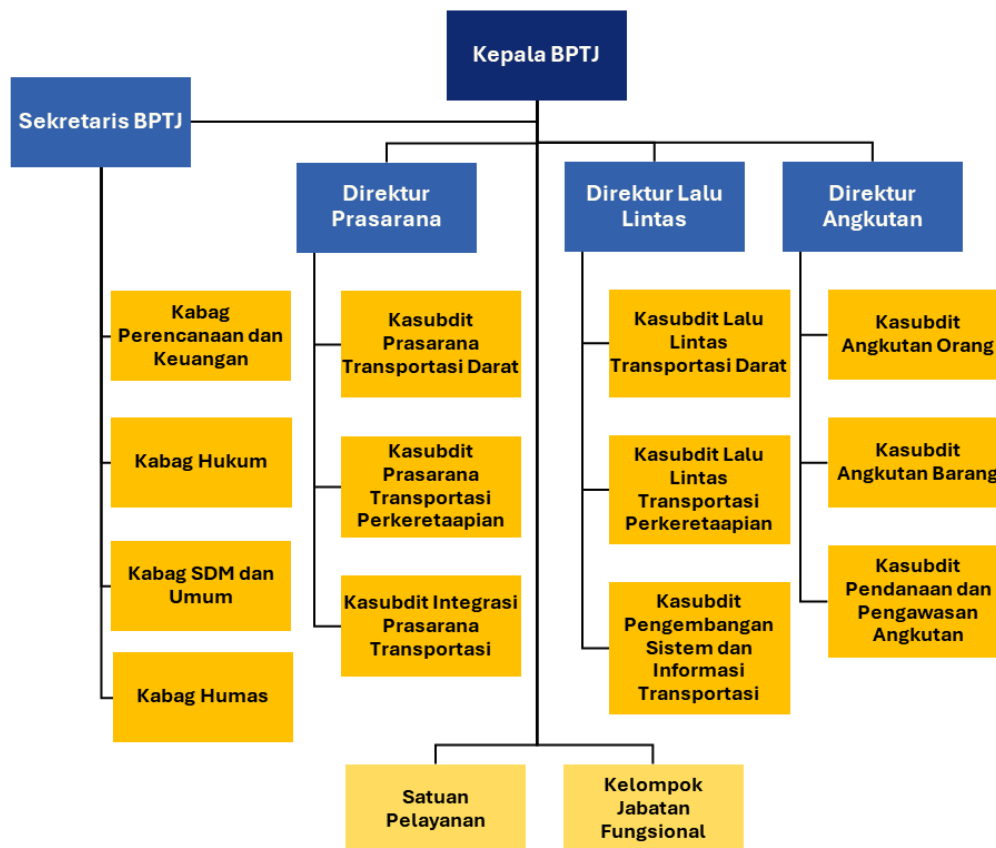
Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam pengembangan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran;
- c. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi;
- e. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan;
- f. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
- g. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- h. Pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana;
- j. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RITJ yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
- k. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Pasal 521 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, terdiri dari Sekretariat, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Direktorat Angkutan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

3.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.

3.2. Direktorat Prasarana

Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

3.3. Direktorat Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

3.4. Direktorat Angkutan

Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

4. PERJANJIAN KINERJA

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun 2024 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut

telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon II dengan Eselon I, serta ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dengan Menteri Perhubungan.

Sasaran Program (SP) BPTJ merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan Sasaran Program dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh BPTJ pada periode sebelumnya. Sasaran Program BPTJ terdiri dari 4 (empat) sasaran program:

1. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek;
2. Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek;
3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek;
4. Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Selanjutnya empat Sasaran Program tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP). Indikator Kinerja Utama BPTJ adalah sebagai berikut:

1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek;
3. OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek;
4. Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek;
5. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ.

Adapun penjabaran dari perspektif sasaran BPTJ dituangkan dalam indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

1. Sasaran Program Pertama (SP1) yang akan dicapai adalah terwujudnya konektivitas transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP1) yaitu Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek.
2. Sasaran Program Kedua (SP2) yang akan dicapai adalah terwujudnya

kinerja layanan transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a. IKP 2.1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi perkotaan Jabodetabek.
 - b. IKP 2.2: On Time Performance (OTP) layanan transportasi perkotaan Jabodetabek.
3. Sasaran Program Ketiga (SP3) yang akan dicapai adalah terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP3) yaitu Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek.
 4. Sasaran Program Keempat (SP4) yang akan dicapai adalah tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP5) yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Korelasi antara Sasaran Strategis Kementerian, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program serta satuan dan target diuraikan dalam tabel I.1.

Tabel I.1 Perjanjian Kinerja Kepala BPTJ Tahun 2024

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
SS1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45
SS2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94
		IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
SS3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	SP3 Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	%	100
SS4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62

Sumber: Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2024

BAB II

DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran program BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran program yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2024 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Program (IKP) BPTJ, berikut adalah pencapaian Sasaran Program (SP) BPTJ pada Triwulan IV Tahun 2024:

Tabel II. 1 Realisasi Capaian Kinerja BPTJ Triwulan IV Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Target Tw IV 2024	Realisasi Tw IV 2024	% Capaian Tw IV
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Indeks	0,45	0,45	0,507	110%
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks	94	94	93,978	99,977%
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	88	88	88,280	100,318%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Target Tw IV 2024	Realisasi Tw IV 2024	% Capaian Tw IV
SP3 Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek	%	100	100	91,013	91,013%
SP4 Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ	Indeks	62	62	56,250	90,726%

1.1. IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur transportasi perkotaan memegang peran krusial dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Jabodetabek, sebagai salah satu kawasan metropolitan terpadat di Indonesia, menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga konektivitas transportasinya. Oleh karena itu, Analisis Pencapaian Kinerja Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek menjadi suatu kajian penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem transportasi.

Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan adalah alat ukur holistik yang mencakup sejumlah faktor kritis dalam konektivitas. Konektivitas transportasi perkotaan di Jabodetabek diwujudkan dengan tiga unsur pembentuk yaitu konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan, konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel, dan simpul transportasi utama yang terintegrasi. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diukur melalui IKP 1 ini dengan rumus berikut:

$$IKP1 = (30\% \times RKAU_{Jalan}) + (30\% \times RKAU_{KA}) + (40\% \times RST_{Utama})$$

Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan

Konektivitas angkutan umum berbasis jalan mencerminkan cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan di jalan raya yang mengintegrasikan satu wilayah dengan wilayah lain. Dengan adanya layanan angkutan umum yang menghubungkan antar lokasi, masyarakat dapat berangkat menuju tempat tujuan dengan menggunakan angkutan umum sebagai pilihan utama bermobilitas. Konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan diukur menggunakan rumus:

$$RKAU_{Jalan} = \frac{\text{Panjang Trayek AU Berbasis Jalan di Jabodetabek}}{\text{Panjang Jalan di Jabodetabek}}$$

Panjang trayek angkutan umum perkotaan terdiri dari trayek angkutan perkotaan (angkot) dan angkutan bus perkotaan. Panjang trayek angkot dan bus yaitu:

Tabel II. 2 Panjang Trayek Angkot

No.	Kota / Kab	Panjang Lintasan Trayek Angkot (Km)
1	Kota Bogor	368
2	Kabupaten Bogor	835
3	Kota Bekasi	979
4	Kabupaten Bekasi	
5	Kota Depok	466
6	Kabupaten Tangerang	883
7	Kota Tangerang	
8	Kota Tangerang Selatan	
9	Provinsi DKI Jakarta	1846
Total		5.377

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ

Tabel II. 3 Panjang Trayek Bus

No.	Operator	Panjang Lintasan Trayek Bus (Km)
1	Agra Mas	380,8
2	Aja P	276
3	Big Bird	163

No.	Operator	Panjang Lintasan Trayek Bus (Km)
4	Damri	423,1
5	Daya Sentosa Utama	39
6	Hiba Utama	33,4
7	Kosub Bersama	108,3
8	Kramat Djati	82,5
9	Lorena	39
10	Mayasari Bakti	714,4
11	PPD	1411
12	Primajasa	112,6
13	Sinar Jaya	65,6
14	Trans Galaxy	4
15	Trans Kota	8
16	Trans Patriot	12
17	Transjakarta	3509,6
Total		7.382

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ

Tabel II. 4 Total Panjang Trayek

No.	Moda Angkutan Umum	Panjang Lintasan Trayek (Km)
1	Angkot	5.377
2	Bus	7.382,3
Total		12.759

Data panjang trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km sebagaimana disajikan pada lampiran II. Sementara itu data panjang jalan di wilayah Jabodetabek berdasarkan hasil studi yang dilakukan BPTJ adalah sebagai berikut.

Tabel II. 5 Panjang Jalan di Jabodetabek

KAB/KOTA	PANJANG JALAN (KM)		
	NASIONAL	PROVINSI	KAB/KOTA
Jakarta Selatan	14	1.986	
Jakarta Timur	22	1.496	
Jakarta Pusat	-	692	
Jakarta Barat	12	1.170	
Jakarta Utara	12	1.089	
Kab. Bogor	123	132	1.764

KAB/KOTA	PANJANG JALAN (KM)		
	NASIONAL	PROVINSI	KAB/KOTA
Kab. Bekasi	29	32	1.077
Kota Bogor	29	12	209
Kota Bekasi	14	22	299
Kota Depok	33	12	1.958
Kab. Tangerang	28	108	993
Kota Tangerang	18	32	255
Tangerang Selatan	10	52	654
Total	14.338		

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ

Berdasarkan data tersebut, penghitungan rasio konektivitas angkutan umum berbasis jalan adalah:

$$RKAU_{Jalan} = \frac{12.759 \text{ Km}}{14.338 \text{ Km}} = 88,68\%$$

Dari perhitungan didapatkan nilai Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan sebesar 88,68.

Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel

Kereta api perkotaan merupakan moda alternatif agar pergerakan masyarakat tidak seluruhnya berfokus pada jalan raya. Kereta perkotaan seperti KRL dapat mencapai jarak yang lebih jauh dengan tarif subsidi yang relatif murah sehingga konektivitas angkutan berbasis rel menjadi unsur yang vital dalam sistem transportasi perkotaan. konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel diukur menggunakan rumus:

$$RKAU_{KA} = \frac{\text{Panjang Jalan Rel KA Perkotaan yang Beroperasi}}{\text{Luas Wilayah Jabodetabek}}$$

Data panjang rel adalah sepanjang 316,938 Km sesuai dengan data tabel berikut:

Tabel II. 6 Panjang Rel Kereta Api Perkotaan

Moda	Jalur/Rute		Panjang (Km)
KRL	1	Bogor – Jakarta Kota	54,516

Moda	Jalur/Rute		Panjang (Km)
	2	Citayam - Nambo	16,237
	3	Manggarai – Kampung Bandan	14,990
	4	Manggarai – Cikarang	39,195
	5	Kampung Bandan - Jatinegara	10,386
	6	Jakarta Kota - Tanjung Priok	7,374
	7	Duri - Tangerang	19,297
	8	Tenjo - Tanah Abang	48,151
	9	Cikarang - Kedung Gedeh	11,771
	10	Ancol - Rajawali	3,629
	11	Bogor - Cigombong	19,662
LRT	1	Cawang – Cibubur	14,890
	2	Cawang – Duku Atas	11,050
	3	Cawang – Bekasi Timur	18,490
	4	Pegangsaan Dua - Velodrome	5,800
MRT	1	Lebak Bulus – Bundaran HI	15,700
	2	Bundaran HI – Kota	5,800
Total			316,938

Sumber: Direktorat Prasarana BPTJ

Sementara itu, luas wilayah Jabodetabek adalah seluas 6.437,89 Km² sebagaimana dijabarkan dalam tabel:

Tabel II. 7 Luas Wilayah Jabodetabek

Wilayah	Luas (Km ²)
DKI Jakarta	664,01
Kabupaten Bogor	2710,62
Kota Bogor	118,5
Kota Depok	200,29
Kota Bekasi	206,61
Kabupaten Bekasi	1224,88

Wilayah	Luas (Km ²)
Kabupaten Tangerang	1011,86
Kota Tangerang	153,93
Kota Tangerang Selatan	147,19
Total	6437,89

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh penghitungan untuk rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel:

$$IKK2 = \frac{316,938 \text{ Km}}{6.437,89 \text{ Km}^2} = 0,0492$$

Dari perhitungan didapatkan nilai Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel sebesar 0,0492.

Rasio Integrasi Simpul Utama

Integrasi dilaksanakan dalam rangka kemulusan transportasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Adanya integrasi membuat perpindahan moda pada saat perjalanan ke tempat tujuan menjadi lebih mudah dan nyaman. Untuk itu diperlukan adanya integrasi antar simpul transportasi perkotaan. Rasio integrasi simpul transportasi utama diukur dengan rumus:

$$RST_{Utama} = \frac{\text{Simpul Utama dengan Akses Integrasi ke dan dari Simpul Perkotaan}}{\text{Jumlah Simpul Transportasi Utama di Jabodetabek}}$$

Jumlah simpul transportasi utama yang terintegrasi adalah sejumlah 84 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 151 simpul dengan detail disajikan dalam lampiran IV.

Tabel II. 8 Simpul Terintegrasi di Jabodetabek

Lokasi Simpul Transportasi	Jumlah Total Simpul	Jumlah Simpul Terintegrasi
DKI Jakarta	88	62
Bekasi Raya	16	8
Kota Depok	6	3
Bogor Raya	21	3
Tangerang Raya	20	9
Total	151	85

Sumber: Direktorat Prasarana BPTJ, 2024

Berdasarkan data tersebut, penghitungan rasio integrasi simpul transportasi utama adalah:

$$RST_{Utama} = \frac{85}{151} = 0,563\%$$

Dari perhitungan didapatkan nilai Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi sebesar 55,6.

IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek ditunjang oleh tiga unsur penunjang. Data capaian penunjang IKP1 adalah sebagai berikut:

- Nilai RKAU Jalan sebesar 0,890
- Nilai RKAU KA sebesar 0,049
- Nilai RST Utama sebesar 0,563

Dengan data tersebut, diperoleh penghitungan IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek:

$$IKP1 = (30\% \times 0,890) + (30\% \times 0,049) + (40\% \times 0,563)$$

$$IKP1 = 0,507$$

Dari perhitungan didapat nilai Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek adalah sebesar 0,507. Hasil capaian dari IKP1 mencapai 110% dari target Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar 0,45.

Analisis Pencapaian Kinerja

Selama tahun 2024, BPTJ secara aktif menjalankan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya konektivitas transportasi di wilayah Jabodetabek. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek yaitu:

- Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Prasarana Transportasi di Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Integrasi Prasarana Transportasi
- Monitoring dan Evaluasi Prasarana Transportasi Berbasis Jalan dan Perairan
- Monitoring dan Evaluasi Prasarana Transportasi Berbasis Rel
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Berbasis Rel
- Pembangunan Fasilitas Pendukung Layanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan
- Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki/Sepeda di Wilayah Jabodetabek
- Perencanaan Bidang Integrasi Prasarana Transportasi Perkotaan di Wilayah Jabodetabek
- Perencanaan Bidang Prasarana Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan dan Perairan di Wilayah Jabodetabek
- Perencanaan Bidang Prasarana Transportasi Perkotaan Berbasis Rel di Wilayah Jabodetabek
- Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional Jabodetabek
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Stasiun

Rencana Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, akan dilaksanakan beberapa langkah strategis peningkatan konektivitas yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek

1.2. IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah. IKM ini didasarkan pada hasil survei kepuasan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pelayanan publik.

Hal tersebut mencerminkan pentingnya evaluasi secara sistematis terhadap kinerja instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik sesuai dengan standar yang diinginkan oleh masyarakat. IKM menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik serta sebagai dasar untuk perbaikan dan inovasi.

IKM pada indikator kinerja BPTJ mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan terminal dan angkutan umum yang menjadi kewenangan BPTJ dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Rentang nilai IKM yang digunakan adalah nilai 1—100 dengan kategori mutu A s.d. D:

1. Nilai Interval 0,00-64,99 artinya kinerja unit pelayanan Tidak Baik (D);
2. Nilai Interval IKM 65,00-76,60 artinya kinerja unit pelayanan Kurang Baik (C);

3. Nilai Interval IKM 76,61-89,99 artinya kinerja unit pelayanan Baik (B);
4. Nilai Interval IKM 90-100,00 artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik (A).

Terdapat 8 (delapan) unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat di mana terdapat atribut pertanyaan untuk mewakili unsur-unsur tersebut. Atribut pertanyaan untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam jasa pelayanan angkutan umum di Jabodetabek yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 9 Unsur Pelayanan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Atribut Pertanyaan
1	Informasi	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik
2	Persyaratan	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini
3	Prosedur/Alur	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan
4	Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini
5	Tarif/Biaya	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
6	Sarana Prasarana	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan
7	Respons	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat
8	Konsultasi dan Pengaduan	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

Sumber: Sistem Aplikasi 3AS Case Survey Management

Berdasarkan delapan unsur pelayanan dan atribut pertanyaan tersebut, dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek melalui aplikasi 3AS Case Survey

Management System yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan. Pada aplikasi tersebut BPTJ dapat memantau dan melakukan evaluasi atas nilai IKM yang bersumber dari lokasi survei.

Pelaksanaan survei pengukuran kepuasan masyarakat atas kinerja BPTJ dilakukan di empat lokasi yaitu:

1. Terminal Tipe A Jatijajar;
2. Terminal Tipe A Baranangsiang;
3. Terminal Tipe A Pondok Cabe;
4. Terminal Tipe A Poris Plawad.

Survei pengukuran kepuasan masyarakat pada Triwulan IV Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 494 responden dengan detail nilai pada lampiran V. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dari total 494 responden tersebut, maka diperoleh nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut.

Tabel II. 10 Penilaian Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks
1	Informasi	94,08
2	Persyaratan	94,47
3	Prosedur/Alur	94,64
4	Waktu Penyelesaian	94,22
5	Tarif/Biaya	94,62
6	Sarana Prasarana	92,63
7	Respons	93,21
8	Konsultasi dan Pengaduan	93,94
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,98

Sumber: Sekretariat BPTJ

Kemudian berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil nilai di atas sebesar “93,98,” maka mutu pelayanan yang didapat adalah bernilai “A”
- b. Sehingga berdasarkan mutu pelayanan di atas, maka kinerja unit pelayanan dapat di kategorikan “Sangat Baik.”

Adapun berdasarkan hasil survei tersebut, realisasi nilai IKM adalah 93,98 atau tercapai sebesar 99,98% dari target sebesar 94.

Analisis Pencapaian Kinerja

Sepanjang tahun 2024, BPTJ telah menjalankan sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek. Melalui serangkaian kegiatan, BPTJ berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi sebagai respons atas kebutuhan masyarakat, dan memperkuat interaksi positif antara pengguna layanan dengan sistem transportasi umum massal perkotaan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek yaitu:

- Dukungan Operasional Peralatan Penunjang Kinerja Lalu Lintas
- Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Angkutan Transportasi Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Berbasis Jalan di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Layanan Angkutan Barang di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Layanan Angkutan Orang di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Prasarana Transportasi Berbasis Jalan dan Perairan
- Monitoring dan Evaluasi Sistem dan Informasi Transportasi di Wilayah Jabodetabek
- Operasional ATCS

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Angkutan Barang
- Pelaksanaan Sosialisasi Bidang Lalu Lintas Darat
- Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) Terintegrasi Koridor Jabodetabek
- Pembangunan Fasilitas Pendukung Layanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan
- Pemeliharaan ATCS dan Penunjang ITS Lainnya
- Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Pemeliharaan Sistem E-Terminal Penumpang Tipe-A
- Peningkatan Layanan Kinerja Lalu Lintas Transportasi Darat di Wilayah Jabodetabek
- Peningkatan Layanan Sistem Informasi Transportasi di Wilayah Jabodetabek
- Perencanaan Bidang Angkutan Orang di Wilayah Jabodetabek
- Perencanaan Transportasi Antarmoda Jabodetabek
- Subsidi pada Trayek Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek
- Supervisi Pembangunan ATCS Terintegrasi Koridor Jabodetabek

Rencana Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, akan dilaksanakan koordinasi dengan masing-masing unit pelayanan publik (satuan pelayanan terminal di lingkungan BPTJ dan perizinan angkutan orang di PTSA Gedung Cipta Kemenhub) untuk fokus mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja layanan yang nilainya masih bisa ditingkatkan.

1.3. IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

On Time Performance (OTP) dalam layanan transportasi mengacu pada tingkat keberhasilan atau ketepatan waktu suatu moda transportasi dalam menjalankan jadwal atau waktu perjalanan yang telah ditetapkan. OTP menjadi indikator yang sangat penting dalam mengukur efisiensi dan kualitas layanan transportasi.

OTP menunjukkan perbandingan antara jumlah keberangkatan dan kedatangan angkutan umum yang tepat waktu dengan jumlah total

keberangkatan dan kedatangan angkutan umum. Data diperoleh dengan melakukan rekapitulasi atas waktu kedatangan dan keberangkatan bus dan kereta api.

Penghitungan OTP dilaksanakan terhadap angkutan umum bus perkotaan yang perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan angkutan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Data OTP bus diperoleh dari survei on board. Sementara data OTP kereta diperoleh dari PT. Kereta Commuter Indonesia sebagai operator KRL. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut

Tabel II. 11 On Time Performance Bus Perkotaan

Jumlah Perjalanan Bus	Jumlah Perjalanan Tepat Waktu	% Perjalanan Tepat Waktu
80,000	445.111	80%

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ

Hasil survei *on board* terhadap perjalanan bus menunjukkan bahwa dari 80.000 perjalanan, terdapat 445.111 perjalanan yang mencapai tujuan dengan tepat waktu atau sebesar 80%.

Tabel II. 12 On Time Performance Kereta Api Perkotaan

Jumlah Perjalanan KA	Jumlah Perjalanan Tepat Waktu	% Perjalanan Tepat Waktu
96,561	405.082	96,561%

Sumber: Direktorat Lalu Lintas BPTJ

Data ketepatan waktu perjalanan kereta api perkotaan pada Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 96,561 perjalanan, terdapat 405.082 perjalanan yang tepat waktu atau sebesar 96,561%.

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek dihitung dengan rumus:

$$IKP2.2 = (50\% \times OTPAU \text{ Jalan}) + (50\% \times OTPAU \text{ KA})$$

$$IKP2.2 = (50\% \times 88,280) + (50\% \times 100,319)$$

$$IKP2.2 = 88,280$$

Realisasi kinerja On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek pada Triwulan IV tahun adalah 88,280 atau mencapai 100,319% dari target 88.

Analisis Pencapaian Kinerja

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh BPTJ guna mendukung pencapaian target kinerja On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek di tahun 2024 untuk mencerminkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan mutu layanan transportasi publik. Dalam mengejar tujuan kinerja, BPTJ memberikan penekanan pada ketepatan waktu dalam pengoperasian transportasi, yang diukur melalui indikator OTP.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek adalah:

- Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Lalu Lintas Transportasi Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Berbasis Rel di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Layanan Angkutan Orang di Wilayah Jabodetabek
- Peningkatan Layanan Kinerja Lalu Lintas Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek
- Perencanaan Bidang Lalu Lintas Transportasi Rel di Wilayah Jabodetabek
- Perencanaan Bidang Prasarana Transportasi Perkotaan Berbasis Rel di Wilayah Jabodetabek

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut mencerminkan sikap proaktif BPTJ dalam menanggapi tuntutan efisiensi waktu dalam layanan transportasi perkotaan. Pencapaian target kinerja menjadi landasan evaluasi yang

konkret dan memberikan dasar yang jelas untuk mengukur keberhasilan upaya yang telah dilakukan. Adanya orientasi pada efisiensi dan ketepatan waktu juga mencerminkan upaya BPTJ untuk memastikan bahwa transportasi publik menjadi pilihan yang lebih andal dan efektif bagi masyarakat.

Namun demikian, tetap ada tantangan dalam mencapai target OTP, terutama mengingat kompleksitas operasional transportasi perkotaan dan adanya gangguan atau hambatan. Dalam konteks ini, pelaksanaan berbagai kegiatan oleh BPTJ harus dilihat sebagai langkah awal yang positif dalam perbaikan sistem transportasi.

1.4. IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek

Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek diwujudkan dengan tingkat keselamatan perjalanan angkutan umum perkotaan Jabodetabek. Nilai ini membandingkan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan bus perkotaan dengan jumlah total perjalanan bus perkotaan di wilayah Jabodetabek. Data kecelakaan bus perkotaan diperoleh atas hasil koordinasi dengan perusahaan otobus sebagai operator bus perkotaan pada layanan Transjabodetabek, Jabodetabek Residence Connexion (JRC), dan Jabodetabek Airport Connexion (JAC). Tiga layanan tersebut dipilih karena perizinan layanan dikeluarkan oleh BPTJ.

Data kecelakaan angkutan bus perkotaan pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 13 Kejadian Kecelakaan Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Jumlah Trip/Tahun	Jumlah Kejadian Kecelakaan
1.	Jabodetabek Airport Connexion (JAC)	121.922	0
2.	Jabodetabek Residence Connexion (JRC)	23.920	5
3.	TransJabodetabek	12.208	0

4.	Angkutan Buy The Service (BTS)	398.338	0
----	--------------------------------	---------	---

Sumber: Direktorat Angkutan BPTJ

Data kejadian kecelakaan bus perkotaan pada Triwulan IV Tahun 2024 masih berada pada proses penghitungan final melalui kerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) sehingga belum dapat disajikan di laporan monitoring capaian kinerja triwulan ketiga.

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP3 Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek dihitung menggunakan rumus:

$$IKP3 = 100\% - \left(\frac{\sum \text{Kecelakaan AU}}{\sum \text{Perjalanan AU}} \right) \times 10.000$$

$$IKP3 = 100\% - \left(\frac{5}{556.388} \right) \times 10.000 = 91,013$$

Analisis Pencapaian Kinerja

Perusahaan Operator berperan kunci dalam menyediakan informasi yang memadai dan relevan untuk mengevaluasi tingkat keamanan transportasi umum. Kurangnya pelaporan data operasional bukan hanya mengecikan gambaran risiko kecelakaan, tetapi juga menghambat identifikasi tren dan pola kejadian, yang penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Sebagai contoh, tanpa data yang memadai, sulit untuk menilai apakah faktor-faktor seperti kondisi jalan, cuaca, atau tingkat kepadatan lalu lintas berkontribusi pada kecelakaan.

Selain itu, keterbatasan data juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi umum. Keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan tidak hanya merupakan kewajiban untuk memenuhi standar kinerja, tetapi juga merupakan elemen krusial untuk membangun kepercayaan publik. Kejelasan dalam menyajikan data akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko yang mungkin dihadapi saat menggunakan angkutan umum.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BPTJ untuk mewujudkan keselamatan transportasi adalah:

- Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru yang Memenuhi Standar Keselamatan di Wilayah Jabodetabek
- Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS) di Wilayah Jabodetabek
- Layanan Angkutan Orang di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Layanan Angkutan Barang di Wilayah Jabodetabek
- Monitoring dan Evaluasi Layanan Angkutan Orang di Wilayah Jabodetabek
- Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Pengawasan Operasi Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek
- Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional Jabodetabek Lainnya
- Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi Banten

1.5. IKP5 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda). Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dilaksanakan berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025. Grand Design menjadi acuan bagi K/L/Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, bertanggung jawab, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Selain itu, tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi pemerintah;
2. Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang paling baik;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program

instansi;

5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan
6. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tingkat reformasi birokrasi sebuah unit pemerintah diukur dengan nilai reformasi birokrasi yang didapatkan dari hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.

Berdasarkan keterangan di atas, didapati bahwa terdapat dua dimensi RB yaitu RB General dan RB Tematik. RB General merupakan potret dari lingkup reformasi birokrasi di Kementerian. Sehingga RB yang bisa dinilai dari BPTJ adalah RB Tematik yang mengukur capaian indikator dari tema yang berkaitan. Adapun indikator yang diangkat pada RB Tematik BPTJ adalah “Waktu penyelesaian proses perizinan angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek.”

Untuk mengevaluasi RB Tematik tersebut, dilakukan penilaian atas empat unsur indikator sebagaimana tertera pada kertas kerja evaluasi RB yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
2. Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan;
3. Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan);

4. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi

Hasil evaluasi reformasi birokrasi BPTJ telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan hasil sebagai berikut.

Penilaian	Bobot	Nilai
Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;	25	6,000
Ketercapaian <i>output</i> kegiatan pada setiap triwulan;	25	12,500
Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan);	25	6,250
Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi	25	12,500
Total		56,250

Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, realisasi nilai Reformasi Birokrasi Tematik BPTJ Tahun 2024 adalah 56,25 atau tercapai sebesar 90,73% dari target 62. Namun perlu diketahui bahwa nilai tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan RB Tematik tahun 2023 yang nilainya diperoleh pada tahun 2024.

Permasalahan

RB Tematik BPTJ sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 89 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020 - 2024, mengangkat isu perizinan Angkutan Sewa Khusus dengan indikator jumlah Kartu Pengawasan Elektronik yang telah dicetak. Hal ini sulit tercapai dikarenakan Kartu Pengawasan Elektronik bagi Angkutan Sewa Khusus bersifat fluktuatif

setiap tahun dan tidak bisa diprediksi mengikuti nilai tren sebelumnya. Jumlah Kartu Pengawasan Elektronik pada tahun 2021 sejumlah 3.942, Tahun 2022 sejumlah 6.259, dan Tahun 2023 sejumlah 4.478.

Rencana Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang akan diambil oleh BPTJ adalah:

1. Melengkapi dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan yang menunjang RB tematik
2. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang dituangkan pada rencana aksi
4. Mengubah indikator pelaksanaan RB Tematik menjadi laporan yang berisi monitoring verifikasi dokumen perizinan, jumlah penerbitan Sertifikat Standar Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan penerbitan Kartu Pengawasan Elektronik Angkutan Sewa Khusus
5. Target RB Tematik perlu disusun dengan memperhatikan cara pengukuran/penghitungannya

2. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Alokasi anggaran BPTJ pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.330.174.011.000 (tiga ratus tiga puluh miliar seratus tujuh puluh empat juta sebelas ribu rupiah). Rincian anggaran per jenis belanja beserta realisasi per Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 14 Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024

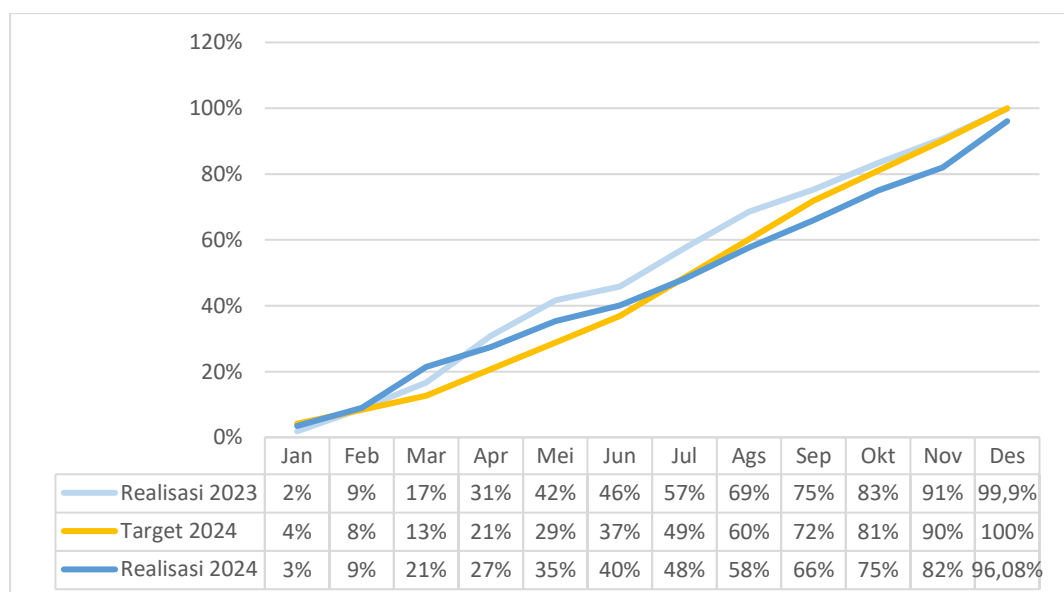
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	37.157.078.000	37.150.877.808	99,98%
Belanja Barang	228.563.153.000	222.481.822.129	97,34%
Belanja Modal	64.453.780.000	57.609.787.934	89,38%

Sumber: OMSPAN

3. Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

Anggaran BPTJ per bulan Desember tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp.218.888.711.464 atau 66,29% terhadap pagu total. Kurva S perbandingan target, realisasi, dan realisasi tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut.

Gambar II.1 Kurva S Realisasi Anggaran



Sumber: Sekretariat BPTJ, 2024

Tabel II. 15 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP

Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi	%
IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	37.026.688.000	36.996.304.320	99,918%
IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	117.884.051.000	117.577.283.859	99,740%
IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	8.899.375.000	8.898.359.940	99,989%
IKP3 Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	45.867.450.000	45.842.905.741	99,946%
IKP5 Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	108.085.811.000	107.954.451.596	99.878%

Sumber: Sekretariat BPTJ

4. Efisiensi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

Penghitungan efisiensi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pengukuran efisiensi Output Program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^n [(AA Program_i \times COP_i) - RA Program_i]}{\sum_{i=1}^n AA Program_i} \times 100\%$$

Keterangan:

EOP : Efisiensi Output Program

AA Program : Alokasi Anggaran

RA Program : Realisasi Anggaran

COP : Capaian Output Program

n : Jumlah Output Program

Perhitungan efisiensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan data perbandingan antara alokasi anggaran, realisasi anggaran dan capaian output.

Pada Triwulan IV Tahun 2024, BPTJ mencatatkan adanya efisiensi anggaran sebesar 17,40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 16 Efisiensi Anggaran

IKP	Capaian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA X COP) - RA	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)÷(3)
IKP1	111,85%	37.026.688.000	36.996.304.320	41.414.350.528	4.418.046.208	11,93%
IKP 2.1	99,98%	117.884.051.000	117.577.283.859	117.860.474.190	283.190.331	0,24%
IKP 2.2	100,32%	8.899.375.000	8.898.359.940	8.927.853.000	29.493.060	0,33%
IKP3	91,01%	45.867.450.000	45.842.905.741	41.743.966.245	-4.098.939.496	-8,94%
IKP5	90,73%	108.085.811.000	107.954.451.596	98.066.256.320	-9.888.195.276	-9,15%
Total		330.174.011.000	317.269.305.456	308.012.900.283	-9.256.405.173	-2,80%

Nilai efisiensi 2,80% dipengaruhi oleh nilai realisasi anggaran yang baru mencapai 96,08% pada Triwulan IV Tahun 2024 serta masih terdapat indikator kinerja yang belum diperoleh nilainya

BAB III

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah dihitung dimana tiga IKP telah mencapai target dan dua IKP yang masih dalam proses penghitungan.
2. Adapun rincian capaian masing-masing IKP pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Sasaran Program 1 “Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek” IKP1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek terealisasi sebesar 0,507 (target 0,45);
 - b. Sasaran Program 2 “Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek”
 - IKP2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 93,978 (target 94);
 - IKP2.2. On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 88,280 (target 88);
 - c. Sasaran Program 3 “Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek” IKP3. Tingkat Keselamatan Perjalanan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 91,013 (target (100));
 - d. Sasaran Program 4 “Tercapainya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek” IKP5. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 56,250 (target 62).

3. Realisasi anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.317.242.487.871 atau sebesar 96,08% terhadap pagu anggaran Rp.330.174.011.000.

B. Saran

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024, beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja sasaran konektivitas transportasi perkotaan Jabodetabek melalui:
 - a. Melakukan koordinasi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek;
 - b. Berkoordinasi secara berkala dengan pemerintah daerah/pusat terkait rencana pembangunan halte BTS;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek
2. Meningkatkan kinerja sasaran pelayanan transportasi perkotaan Jabodetabek melalui:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unit pelayanan publik untuk fokus mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja layanan yang nilainya masih bisa ditingkatkan
 - b. Memperkuat koordinasi dengan pihak internal dan eksternal untuk dukungan terhadap pemenuhan ketepatan waktu angkutan umum perkotaan
 - c. Melakukan analisis lanjutan untuk memperoleh prioritas lokasi atau Jalur Perlindungan Langsung (JPL) dalam penanganan perlintasan sebidang
3. Meningkatkan kinerja sasaran keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan Jabodetabek melalui:

- a. Pengawasan penyelenggaraan angkutan wilayah Jabodetabek;
 - b. Pengecekan, penerapan pelayanan dan standar pelayanan minimal angkutan umum di wilayah Jabodetabek;
 - c. Penghargaan pramudi dan masinis teladan serta operator angkutan umum terbaik di wilayah Jabodetabek;
 - d. Pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana angkutan di wilayah Jabodetabek.
4. Meningkatkan kinerja sasaran tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di badan pengelola transportasi Jabodetabek melalui:
- a. Melengkapi dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan yang menunjang RB tematik
 - b. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang dituangkan pada rencana aksi
 - d. Mengubah indikator pelaksanaan RB Tematik menjadi laporan yang berisi monitoring verifikasi dokumen perizinan, jumlah penerbitan Sertifikat Standar Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dan penerbitan Kartu Pengawasan Elektronik Angkutan Sewa Khusus